

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS  
*İSBÂT* NIKAH PADA MASYARAKAT LALO BAJO  
KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR  
KABUPATEN BONE**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**EGATUTI WIDIAWATI**

NIM. 10100114017

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EGATUTI WIDIAWATI  
Nim : 10100114017  
Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 07 Juli 1997  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Isbāt Nikah pada Masyarakat Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Desember 2017

Penulis



EGATUTI WIDIAWATI  
NIM: 10100114017

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH PADA MASYARAKAT LALO BAJO KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE", yang disusun oleh Egatuti Widiawati, NIM:10100114017, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 02 April 2018 M  
16 Rajab 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M. Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Numaningsih, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hj. Hartini, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.	(.....)

Ditahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
Nip. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya. Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Muh. Malla dan Ibunda Hj. Mase Ati, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku yang tercinta beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan

bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Supardin M.HI.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Ibu **Dra. Hj. Hartini, M.H.I.** selaku pembimbing I dan Bapak **Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;



6. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini terutama kak **Samsir, S. Pdi**
7. Seluruh teman-teman Capdol, **Arohmahani Ranti Saputri, Mirnawati Umar, Hartinah, Arti, Nur Fadilah Juanda Putri, Endang Satriani, Nur Fitri Hariani, Ahmad Ridho, Mohd. Walid B. Rukman, Hamzah Has.** selama  $\pm 3$  tahun kebersamaannya menempuh bangkuh perkuliahan sampai selesai;
8. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2014 Khususnya **Ferdiangsa, Muh. Syahrul, Nur Fadli, Muh. Rifki Al-Hadi, Lisa, Ferdiansyah Dahlan,** dan semua teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan dan telah memberikan pengalaman di 4 tahun perkuliahan yang sangat luar biasa, semoga Allah memberkahi setiap langkah di dalam hidup kita;
9. Seluruh teman-teman serta senior-senior sahabat/wati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang telah mengajarkan tentang cara kemandirian, berproses dengan orang-orang yang menggelut dalam oranganisasi ekstra, serta mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak saya dapatkan di dalam kelas.
10. Seluruh teman KKN ku terutama teman Posko 9 Desa Palambara, **Nurfadly, Hamzah Has, Nur Ainun Fadhliana, Kiswa Badran Al-Mahi. A, Reskyatri Faradisa Faruki, Risma Husni Waris, Dian Malam, Puspita Hamka, dan Nurul Reski Fauzia Barsas.** Selama  $\pm 2$  bulan bersama menjalani tugas akhir dalam Kuliah Kerja Nyata ini.

11. Dan kepada seluruh teman-teman para pejuang skripsi jangan mudah menyerah, ingat badai pasti berlalu, Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 08 Desember 2017

Penulis

**EGATUTI WIDIAWATI**  
**NIM: 10100114017**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xvi
BABIPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
BAB IITINJAUAN TEORETIS	
A. Perkawinan.....	9
B. Isbāt Nikah.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	40
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Penelitian .....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	44
G. Pengujian Keabsahan Data .....	44



#### BAB IV EFEKTIVITAS *IṢBĀT* NIKAH PADA MASYARAKAT LALO BAJO DI TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Suku Bajo Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.....	46
B. Pemahaman Masyarakat Suku Bajo tentang Perkawinan.....	49
C. Efektivitas <i>Iṣbāt</i> Nikah terhadap Perkawinan Masyarakat Suku Bajo.....	57
D. Analisis Hukum Islam terhadap Efektifitas <i>Iṣbāt</i> Nikah pada Masyarakat Suku Bajo .....	64

#### BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian .....	70

DAFTAR PUSTAKA .....	71
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
---------------------------	----



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ALA UDDIN  
M A K A S S A R



## ABSTRAK

**NAMA : Egatuti Widiawati**

**NIM : 10100114017**

**JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Isbāt Nikah pada Masyarakat Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap efektivitas Isbāt nikah pada masyarakat suku bajo kecamatan tanete riattang timur kabupaten Bone? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat Suku Bajo tentang perkawinan? 2) Bagaimana efektivitas isbāt nikāh terhadap perkawinan masyarakat kampung Bajo?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis normative, Syar’I, Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Tokoh adat Suku bajo (*Lalo Bajo*), masyarakat kampung bajo, serta Hakim-hakim Pengadilan Agama. Selanjutnya, untuk memperoleh data tentang masalah ini maka digunakan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, library research dan fiel research. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat suku bajo tentang perkawinan itu sendiri adalah hal yang sangat minim, dalam melaksanakan prosesi perkawinan dan sangat sedikit yang memahami konsep perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Guna mengatasi dampak dari perkawinan tersebut Pelaksanaan isbāt nikahterhadap masyarakat suku bajo khususnya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA terbilang sangat efektif. Karena masyarakat suku bajo dapat memanfaatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum sebagai pasangan yang sah, pengurusan surat-surat dari kantor pemerintah setempat. Seperti akta kelahiran bagi anak-anak mereka, kartu keluarga.

Implikasi dari penelitian adalah: 1) Kepada pemerintah bahwa masyarakat Suku Bajo kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan formal. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi pernikahan dibawah tangan tanpa mencatatkan ke kantor KUA setempat yang mengakibatkan keluarga mereka sulit mendapatkan kartu identitas sebagai warga Negara. 2) Isbāt nikah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama tentunya sangat berpengaruh untuk masyarakat Suku Bajo yang telah melakukan pernikahan dibawah tangan, tidak hanya berjalan sendiri, perlu kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sesuai ketentuan yang berlaku. Maka harus dilakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar supaya berefektif.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Dalam hal ini banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa tercatat (perkawinan di bawah tangan), suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

Suku Bajo merupakan suatu komunitas yang hidup di atas perahu, dan biasa disebut dengan “manusia perahu”. Suku Bajo adalah suku laut yang hingga sekarang masih memukimi banyak lokasi diseluruh nusantara. Dimana ada tanjung maka disana lah Suku Bajo membangun kehidupan.<sup>1</sup>

Mata pencaharian utama suku Bajoe adalah mencari ikan dengan cara yang masih terbelang tradisional seperti memancing, memanah dan menjaring ikan. Sejak umur tujuh tahun anak-anak mereka belajar menangkap ikan dan menjual hasilnya, mereka juga mengakui mencari ilmu pengetahuan penting tetapi

---

<sup>1</sup>Mukti Ali, *Suatu Etnografi Suku Bajo*, (Cet 1; Jawa Tengah: STAIN Salatiga PRESS, 2010), h. 14.

pengetahuan menangkap ikan lebih penting karena menyangkut kelangsungan hidup mereka.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup>

Isbāt nikāh hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara', tentunya isbāt nikāh yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam QS. al-Bāqārāh/2: 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

---

<sup>2</sup>Abdullah K, *Suku Bajo di Kabupaten Bone Dan Pola Penghidupannya*, (Cet 1; Makassar: 1990), h. 2.

<sup>3</sup>Tihani.& Sohari Sahrani.*Fiqh Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap)*, (Cetakan ke-4; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 6.

Dari ayat di atas, dapat di pahami bahwapencatatan perkawinan dan akta isbāt nikāh adalah hal yang sangat penting bagi penduduk yang mendiami wilayah RI.<sup>4</sup> Dalam hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai efektifitas isbāt nikāh di masyarakat kampung Bajo karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan yang sah menurut hukum Islam, melalui proposal penelitian yang hasilnya akan dijadikan sebuah karya tulisan ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Isbāt Nikah pada Masyarakat Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.**

Data awal mengenai kasus pernikahan yang tidak tercatat di KUA dari masyarakat suku Bajo diantaranya yaitu Saparuddin dengan Yecce, Jumardi dengan Nadira. Dari perkataan Kepala Suku (*Lalo Bajo*) di Suku Bajo atas nama Bapak Deri mengenai kasus yang terjadi di sana adalah mereka menikah tanpa tercatat di KUA. Bahkan masyarakat disana rata-rata pernikahannya tanpa tercatat, yang menjadi masalah dalam pernikahannya adalah susahnya dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Akta Kelahiran. Sektor pendidikan dinilai menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan. Saat ini, banyak anak-anak Suku Bajo yang orang tuanya tidak mendorong untuk bersekolah. Hal ini mengakibatkan tingginya masalah buta huruf pada masyarakat Bajo, Masyarakat kampung Bajo tetap sampai sekarang menganut agama Islam. Dalam kasus ini penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai efektifitas isbāt nikāh di masyarakat kampung Bajo karena kurangnya

---

<sup>4</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata Hukum Perkawinan Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 78.

pemahaman tentang pernikahan yang sah menurut perundang-undangan dan menurut hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **a. Fokus Penelitian**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Isbāt Nikah pada Masyarakat Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”. Peneliti akan meninjau dampak terhadap legalitas perkawinan masyarakat Suku Bajo dalam Pandangan Islam dan efektivitas isbāt nikāh terhadap perkawinan masyarakat Suku Bajo.

### **b. Deskripsi Fokus**

1. Tinjauan: Suatu aspek dimana melihat dari jauh dari tempat tinggi, atau melihat keadaan disuatu tempat.
2. Hukum Islam: Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kegiatan berdasarkan kitab Quran: Hukum syarah.
3. Efektivitas: berasal dari efektif yang artinya dampak atau pengaruh, jadi efektivitas adalah dapat membawa hasil, pengaruh-pengaruh terhadap suatu hal yang baik, usaha serta tindakan.<sup>5</sup>
4. Isbāt Nikah: Penetapan atau penentuan nikah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284.

<sup>6</sup> Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), h. 246.

5. Suku Bajo: Suatu komunitas, daerah atau perkumpulan masyarakat yang mempunyai Tokoh Adat atau disebut dengan *Lalo Bajoyang* tinggal dilaut atau pesisir yang kesehariannya melaut sehingga masih percaya bahwa laut adalah kehidupan mereka, bahkan tinggal di atas perahu. Tidak terlepas dari tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas isbāt penelitian suatu peristiwa atau kejadian hukum dimana salah seorang masyarakat akan mengesahkan perkawinan yang telah mereka lakukan yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan Syariat Islam.

Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan isi dari skripsi ini dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap efektifitas isbāt nikāh di masyarakat suku Bajo tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan satu pokok permasalahan skripsi ini yaitu Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Isbāt Nikah pada Masyarakat Suku Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu:



1. Bagaimana pemahaman masyarakat Suku Bajo tentang Perkawinan?
2. Bagaimana efektivitas isbāt nikah terhadap perkawinan masyarakat Suku Bajo?

#### **D. Kajian Pustaka**

Setelah menyusun dan mempelajari beberapa referensi berkenaan dengan judul skripsi ini, maka peneliti memilih beberapa buku yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, Hamdan Kurniawan Z (10400111017) meneliti tentang “Permohonan Isbāt Nikāh dalam Pernikahan Siri Pasca Berlakunya UU No. 30 Tahun 2006” (Studi Kasus Perkara No. 523/Pdt.P/2014 PA Mks). Sedangkan Hasdi (02121028) yang meneliti tentang “Peranan Lalo Bajo dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam”.<sup>7</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah K dengan judul “*Suku Bajo Kabupaten Bone Dan Pola Penghidupannya*” menyatakan bahwa Suku Bajo punya identitas khusus yaitu berupa panji atau bendera yang disebut *Ula-ula*, yang merupakan lambang utama tanda pengenal khusus bagi orang Bajo. Bendera tersebut di kibarkan pada waktu berlayar, dan pesta baik hitaman maupun pesta perkawinan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hamdan Kurniawan Z (10400111017) meneliti tentang “Permohonan Isbāt Nikāh dalam Pernikahan Siri Pasca Berlakunya UU No. 30 Tahun 2006” (Studi Kasus Perkara No. 523/Pdt.P/2014 PA Mks). Skripsi tahun 2015.

<sup>8</sup> Abdullah K, *Suku Bajo di Kabupaten Bone Dan Pola Penghidupannya*, (Cet 1; Makassar: 1990), h. 31.

Ketiga, dalam buku “*Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” karya Ahmad Rajafi. Menurut Amir Syarifuddin menjelaskan tentang masalah nikah massal dan *isbāt nikāh* mengenai kemashlahatan dan menjelaskan dengan santun bahwa, bukan *fiqh* yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang tidak mengamalkan *fiqh* yang ditulis waktu itu, untuk kepentingan sekarang.<sup>9</sup>

Keempat, Ny. Soemiyati, dalam buku “*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*” Tahun 1986 menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan merupakan hal yang perlu diketahui mengenai perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan perundang-undangan.

Kelima, K. H. Ma’ruf Amin, dalam buku “*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*” Tahun 2003 di atur dalam BAB II tentang Dasar-dasar Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2), (3) huruf c, d, e dan ayat (4). Yang menjelaskan tentang *isbāt nikāh*.<sup>10</sup>

Keenam, Muh. Jamal Jamil, dalam buku “*Kolerasi Hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*” yang membahas mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang Pernikahan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddi, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 106-107.

<sup>10</sup>Ma’ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam (MUI)*, (Cet terbaru; Jakarta: Permata Press, 2003). h. 3

<sup>11</sup>Muh. Jamal Jamil, *Kolerasi Hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Alauddin university Press, 2001). 17-18.

Penelitian ini dan penelitian terdahulu jelas berbeda yang mana pada penelitian terdahulu hanya membahas seputar Permohonan Isbāt Nikāh dalam Pernikahan Siri Pasca Berlakunya UU No. 30 Tahun 2006. Sedangkan dalam penelitian ini membahas efektifitas isbāt nikāh di Suku Bajo.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Suku Bajo tentang perkawinan
- b. Untuk mengetahui efektivitas isbāt nikāh terhadap perkawinan masyarakat kampung Bajo.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Menambah informasi atau pemahaman tentang perkawinan dalam masyarakat Suku Bajo.
- b. Untuk kegunaan praktis menjadi sumbangsi pemikiran kepada masyarakat suku Bajo untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan perkawinan yang sah menurut Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan “nikah”. Nikah menurut menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.<sup>12</sup> Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt.<sup>13</sup> Para ahli fikih berkata, *zawâj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwîj*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

---

<sup>12</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 7.

<sup>13</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. VI; Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 8.

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah tazwij atau yang semakna dengannya.”<sup>14</sup>

Secara etimologi, *nikah* berarti *dam* yang bermakna menindih, menghimpit atau berkumpul. Dapat juga berarti akad (mengikat tali perkawinan) atau bersetubuh dengan istri.<sup>15</sup>

Secara terminologi, makna *nikah* menurut ulama mutaaddimin berbeda dengan ulama mutaakhirin. Ulama mutaaddimin mengatakan bahwa *nikah* adalah akad yang ditetapkan oleh syara bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Sedangkan ulama mutaakhirin berpendapat bahwa *nikah* berarti akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>16</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *nikah*, dalam hal ini mereka terbagi tiga golongan:

*Pertama*, ulama Hanafiyah berbeda pendapat bahwa makna *nikah* secara hakiki adalah *wata'* (bersetubuh), sedangkan secara majazi bermakna *akad*. Pendapat ini didasarkan atas pemahaman mereka terhadap QS.al-Nisa (4): 22 yang mengandung larangan bagi seorang anak untuk menikahi wanita yang telah dinikahi

<sup>14</sup>Zakiah Drajat dkk., *Ilmu Fikih* (Jilid II; Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 48.

<sup>15</sup>M. Saleh al-Ustaimy, *Pernikahan Islami* (Cet. I; Jakarta: Risalah Gusti, 1971), h. 457.

<sup>16</sup>Muh. Jamal Jamil, *Kolerasi Hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Alauddin University Press, 2001), h. 16.

oleh ayahnya. Kata *nikah* dalam ayat tersebut menurut ulama Hanafiyah harus diartikan *wata'*, bukan *akad*.

*Kedua*, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa makna *nikah* secara hakiki adalah *akad*, sedangkan secara *majazi* bermakna *wata'*. Pendapat ulama ini didasarkan atas pemahaman terhadap QS.al-Baqarah (2): 230 yang mengandung larangan bagi suami berkumpul dengan istri yang ditalak tiga sampai iya menikahi dengan laki-laki lain. Kata *nikah* dalam ayat tersebut menurut ulama golongan ini harus diartikan *akad* bukan *wata'* dengan alasan bahwa yang terkena *qariah* dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah pelaku dalam *wata'*.

*Ketiga*, jumhur ulama yang menggabungkan dua pendapat yang kontradiktif di atas. Menurut jumhur. Jila ditelusuri nassyar<sup>17</sup>, maka akan ditemukan kata *nikah* terkadang digunakan dalam arti *wata'* dan terkadang pula digunakan dalam arti *akad*. Dengan demikian kata *nikah* tidak dapat diartikan sebagai *wata'* atau *akad* saja sebab keduanya merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk itu, kata *nikah* seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan yang dinyatakan dengan ucapan melalui ijab qabul antara wali dengan calon suami yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual.<sup>17</sup>

Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang *nikah* tersebut, membawa implikasi hukum yang berbeda. Implikasi hukum yang dimaksud adalah apabila *nikah* diartikan sebagai *wata'* maka akibat hukumnya adalah haram bagi anak laki-laki

---

<sup>17</sup>Muh. Jamal Jamil, *Kolerasi Hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 17-18.



mengawini wanita yang pernah disetubuhi oleh ayah anak itu secara tidak sah, atau sebaliknya. Oleh karena itu, seorang anak perempuan yang lahir dari hubungan gelap (zina) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu tidak boleh dikawini oleh laki-laki itu, karena bagaimana juga anak perempuan itu adalah anaknya, meskipun secara yuridis ia tidak berhak memperoleh warisan dan perwalian dari laki-laki yang menghamili ibunya. Sebaliknya, apabila *nikah* diartikan *akad*, maka akibat hukumnya adalah wanita yang disetubuhi secara tidak sah oleh seorang laki-laki, maka ia boleh dikawini oleh putra laki-laki tersebut. Bahkan, laki-laki itu boleh mengawini anak dari hasil perzinahannya, jika sekiranya yang dilahirkan itu adalah seorang perempuan. Hal ini disebabkan tidak ada hubungan nasab antara laki-laki pezina dengan anak tersebut.

Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarajana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Dimana pasangan tersebut harus saling melengkapi bahkan saling memahami antara satu dengan yang lain, ada baik dan ada buruk. Misalnya, air yang

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 286.

kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>19</sup>

Perumusan yang diberikan dalam pasal tersebut, bukan saja memuat pengertian dan arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 (1) UUP didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, serta hak dan

---

<sup>19</sup>Mahtuf Ahmad & Ny. Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya)*, (Surabaya: Terbit Terang), h. 270.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukum asalnya adalah mubah, yang bisa saja menjadi wajib atau haram.<sup>21</sup>

Perkawinan merupakan suatu yang dianjurkan dalam Islam. Anjuran tersebut dinyatakan dalam berbagai ungkapan, baik secara eksplisit maupun implisit sesuai dengan isyarat Al-quran dan hadis Rasulullah saw. untuk itu, penulis kemukakan beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan perintah atau anjuran tersebut, antara lain:

1. Firman Allah dalam QS. al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>22</sup>

Ayat tersebut di atas, Allah swt. memperingatkan kepada mereka yang ragu-ragu menikah karena khawatir akan ketidaksanggupan untuk memikul beban dan

<sup>21</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. VI; Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 19.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang:Toha Putra, 1989), h. 549.

menghindarkan diri dari kesulitan hidup. Ketahuilah bahwa Allah akan memberikan kepada mereka penghidupan yang berkecukupan dan karunia yang melimpah, tentu saja di tunjang oleh usaha yang ulet dan gigih.<sup>23</sup>

2. Firman Allah dalam QS. al-Rûm/30: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>24</sup>

3. Firman Allah dalam QS. Al-Dzāriyāt/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Muhammad Jalaluddin al-Qasimiy, *Mahasin al-Ta'will*, jilid XII (Cet.II; Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 200-203.

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2012), h. 406.

<sup>25</sup>Department Agama, Al-Hasib, *al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Samad, 2014), h. 522.

Kalimat (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) dan segala sesuatu baik makhluk hidup mati telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling melengkapi supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah yang Maha Esa dan hanya Dia yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Selain dari ketiga ayat tersebut, masih banyak ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan yang dapat dijadikan dasar untuk melangsungkan pernikahan juga ditemukan dalam hadis Rasulullah saw. diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ يَمْنَا سَنَطًا عَمَّكُمْ لِبَاؤُهُ فَلْيَتَزَوَّا فَإِنَّهَا غَضُّ اللَّبَصِ وَ أَحْصِنِ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَاقٍ. (صحيح البخاري)

Artinya:

Dari Abdillah ibnu Mas'ud berkata: karena sesungguhnya menikah itu bisa memelihara pandangan, bisa memelihara kehormatan dan harga diri, barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu bisa menjadi benteng untuk menjaga diri. Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, jika ia merasa belum mampu, karena itu akan menundukkan pandangan dan memelihara kemalua. (HR. Bukhari)<sup>27</sup>

عن أنس رضي الله عنه قل : النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (صحيح البخاري)

<sup>26</sup>Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 350.

<sup>27</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, juz VI (Beirut: Dai al-Fikr, 1994), h. 143.

Artinya:

Dari Ibnu Anas r.a. berkata: Menikah itu adalah sunahku, maka barang siapa membencinya, ia bukanlah golongan kami. (HR. Bukhari)<sup>28</sup>

Berdasarkan hadis di atas, secara eksplisit menganjurkan umat Islam untuk menikah, anjuran tersebut dimaksudkan selain untuk mengikuti atau menjalankan perintah Allah, juga dimaksudkan untuk memelihara pandangan dan kehormatan, sehingga kehidupan manusia di dunia ini aman dan tentram serta penuh kebahagiaan dengan memperoleh keturunan yang baik dan teratur.<sup>29</sup>

Pada sisi lain, dapat dipahami hadis di atas ternyata masih memberikan alternatif puasa bagi yang belum mampu. Dan menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad Bin Hambal dan Malik bin Anas mengatakan bahwa pernikahan itu pada awalnya dianggap perbuatan yang dianjurkan.

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي قَاصِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبِيلِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا

Artinya:

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia telah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang Ustman bin Madz'un untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkannya, pasti kami akan membujang." (HR. Muslim)<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Imam al-Bukhari, *Dar al Fiqr Beyrut*, Hadisbab al Nikah (Beyrut-Lebanon: Dar al-fiqr, 1986), h. 360.

<sup>29</sup> Muh. Jamal Jamil, *Kolerasi Hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 17.

<sup>30</sup> Ahmad Mudja Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*, (Cet. I; Jakarta: Predana Medika, 2004), h. 34.



Hadis diatas menerangkan tentang larangan membujang meskipun seluruh waktu hanya dipergunakan untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menikah, secara otomatis menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kontrak sosial. Hal yang demikian itu dikategorikan sebagai ibadah horizontal sehingga diberi kompensasi pahala yang cukup besar dari Allah subhanahu wa ta'ala.

Berdasarkan mufassir dan penjelasan hadis di atas maka pernikahan dapat dipahami bahwa pernikahan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dan dapat membangun rumah tangga yang bahagia

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

##### **a. Rukun Perkawinan**

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang dimaksud itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>31</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Adapun rukun dari perkawinan adalah sebagai berikut.

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai Perempuan
- 3) Wali

---

<sup>31</sup> Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 12.

Yang menjadi wali adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita (wali nasab), tetapi dalam keadaan tertentu dapat digantikan oleh wali hakim.

4) Dua orang saksi

Dalam pelaksanaan perkawinan, harus dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat. Menurut pendapat umum walaupun rukun-rukun lain terpenuhi, akan tetapi apabila tidak ada saksi yang menghadirinya maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

5) *Shigat* (ijab qabul)

Ijab menurut arti katanya adalah menawarkan tanggung jawab, sedangkan qabul berarti menerima tanggung jawab dalam pengertian hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dari pihak wanita, sedangkan qabul adalah penegasan penerimaan pengikatan diri itu oleh pengantin pria.<sup>32</sup>

**b. Syarat-syarat Perkawinan**

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

---

<sup>32</sup>Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 78-79.

itu, seperti menutup aurat untuk shalat.<sup>33</sup> Atau menurut Islam calon pengantin lai-laki dan perempuan harus beragama Islam.

Syarat perkawinan yang dimaksud adalah syarat yang bertalian dengan syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *shigat* (ijab qabul).

1) Syarat-syarat suami:

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri;
- c) Orangny tertentu, jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram

Memperhatikan empat syarat di atas dapat dipahami bahwa seorang suami harus memahami ketentuan-ketentuan untuk memperoleh istri yang memahami persyaratan-persyaratan tersebut.

2) Syarat-syarat istri:

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitutidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa *iddah*;
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c) Jelas orangnya;
- d) Tidak sedang berihram

---

<sup>33</sup>H.M.A. Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 12.

Memperhatikan empat syarat di atas dapat dipahami bahwa seorang istri harus memahami ketentuan-ketentuan untuk memperoleh suami yang memahami persyaratan-persyaratan tersebut.

3) Syarat-syarat wali:

- a) Laki-laki;
- b) Baliqh;
- c) Waras akalnya;
- d) Tidak terpaksa;
- e) Adil;
- f) Tidak sedang ihram;

Memperhatikan enam syarat di atas dapat dipahami bahwa seorang wali harus memahami persyaratan-persyaratan dalam menjadi wali tersebut.

4) Syarat-syarat saksi:

- a) Laki-laki;
- b) Baliqh;
- c) Waras akalnya;
- d) Adil;
- e) Dapat mendengar dan melihat;
- f) Bebas dan tidak dipaksa;
- g) Tidak sedang ihram;
- h) Memahami bahasa yang di gunakan saat ijan qabul.

Memperhatikan delapan syarat di atas dapat dipahami bahwa seorang saksi harus memahami persyaratan-persyaratan menjadi saksi dalam suatu pernikahan.

- 5) Syarat-syarat *shigat* (ijab qabul) yakni hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang yang lainnya menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>34</sup>

Memperhatikan syarat di atas dapat dipahami bahwa syarat *shigat* (ijab qabul) harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut.

## 5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

### a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat dan kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan yang disyariatkan perkawinan yaitu pertama untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk

---

<sup>34</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 34-

melanjutkan generasi yang akan datang. Kedua untuk mendapatkan keluarga bahagia ketenangan hidup dan penuh rasa kasih sayang.<sup>35</sup>

Zakiyah Drajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>36</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan.

#### **b. Hikmah Pernikahan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seuruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut.

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 46.

<sup>36</sup>Zakiyah Drajat dkk. *Ilmu Fikih* (Jilid III; Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 64.

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak akan tumbuh menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan;
- 3) Naluri kebakwaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi.
- 4) Pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi menyayangi merupakan masyarakat yang bahagia.<sup>37</sup>

## **B. *Iṣbāt Nikah***

### **1. Pengertian *Iṣbāt Nikah***

*Iṣbāt* nikah berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata yakni *isbāṭ* dan *nikāḥ*. *Iṣbāt* yang merupakan *māzdhār* yang berasal dari kata أَبَتَّ-بَاتًا yang mempunyai makna penetapan atau pembuktian.<sup>38</sup> Mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).<sup>39</sup> Dari kata أَبَتَّ-بَاتًا yang berarti penetapan, penyanggahan, penentuan. Sedangkan menurut *fiqh* nikah secara bahasa

<sup>37</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrana, h. 19.

<sup>38</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 145.

<sup>39</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 339.



berarti نكح artinya "bersenggama atau bercampur".<sup>40</sup> Para ulama' ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli *fiqh* berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.<sup>41</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *isbāt nikāh* adalah penetapan atau penentuan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>42</sup> *Isbāt nikāh* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Dari penggabungan dua kalimat diatas dapat diartikan bahwa *isbāt nikāh* adalah penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa *isbāt nikāh* adalah penetapan oleh pengadilan satu perkawinan yang sah, tetapi tidak mempunyai akta nikah.<sup>43</sup>

Nikah adalah salahsatu ajaran Nabi Adam as.yang diteruskan di dalam ajaran Nabi Muhammad saw. dan sangat ditegaskan bagi seluruh ummatnya dengan

---

<sup>40</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 1.

<sup>41</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 2.

<sup>42</sup> Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), h. 246.

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 339

berbagai ungkapan. Salah satunya adalah bahwa *“barang siapa tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”*<sup>44</sup> Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sebagai sunnah mengisyaratkan agar manusia dapat mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt.

Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Jadi, pada dasarnya isbāt nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.<sup>46</sup> Isbāt (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang

---

<sup>44</sup>Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 169.

<sup>45</sup>Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>46</sup>Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004), h. 67.

sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.<sup>47</sup> Isbāt nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Kewenangan mengenai perkara isbāt nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”<sup>48</sup>

Memperhatikan beberapa pandangan di atas maka dapat dipahami bahwa nikah adalah suatu hal yang baik dalam menyalurkan hubungan seks, menumbuhkan rasa tanggungjawab serta membangun rumah tangga yang bahagia.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>49</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan

---

<sup>47</sup>Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008), 271.

<sup>48</sup>Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

<sup>49</sup>Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*.

kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatnikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo.Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

## **2. Syarat dan Prosedur Isbāt Nikah**

Tentang syarat isbāt nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab *fiqh* klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbāt nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbāt nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum

dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbāt nikah ke Pengadilan Agama.

Tetapi pasal 6 ayat (2) KHI menyebutkan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam hal terjadinya perkawinan sebelum adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974. Bila istri tidak mempunyai akta nikah, maka untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kewarisan haruslah ada buku nikah, untuk itu siistri harus mengajukan isbāt nikah ke Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis, bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada Pengadilan Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan penggugat pemohon maka gugatan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) R. Bg atau pasal 120 HR. gugatan permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/termohon (pasal 142 ayat (1) R. Bg /118 (1) HIR). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1) R. Bg/123 HIR).

Surat gugatan atau permohonan dibuat rangkap enam, masing-masing rangkap untuk penggugat/permohon, satu rangkap tergugat/pemohon atau menurut kebutuhan dan empat rangkap untuk majelis hakim yang memeriksanya.

Apabila surat gugatan hanya dibuat satu rangkap, maka harus dibuat salinannya sejumlah yang diperlukan untuk dilegalisir panitera. Adapun isi gugatan/permohonan yaitu:

1. identitas para pihak (permohonan dan termohon)
  - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
  - b. Umur
  - c. Agama
  - d. Pekerjaan
  - e. Tempat tinggal. Bagi pihak yang tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, “dahulu tinggal di..., tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.”
  - f. Kewarganegaraan (jika diperlukan)
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang menjadi dasar/alasan gugat atau permohonan.<sup>50</sup> Posita berisi:
  - a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum
  - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cet IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 33

3. Potitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.<sup>51</sup>

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan pada sub Kepaniteraan gugatan, sedang permohonan pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Kemudian calon pemohon menghadap ke Meja 1.

1. Meja I
  - a. Menerima surat permohonan dan salinannya
  - b. Menaksir panjar biaya
  - c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
2. Kasir
  - a. Menerima uang panjar dan pembukuan
  - b. Menandatangani SKUM
  - c. Member nomor pada SKUM dan tanda lunas.
3. Meja II
  - a. Mendaftar gugatan dalam register
  - b. Member nomor perkara pada surat gugatan sesuai nomor SKUM
  - c. Menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugatan
  - d. Mengatur berkas dan menyelesaikan kepada ketua melalui wakil panitera+panitera.

---

<sup>51</sup> Mukti Arto, *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h. 39-40.



4. Ketua PA:
  - a. Mempelajari berkas
  - b. Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim)
5. Panitera:
  - a. Menunjuk penitera siding
  - b. Menyerahkan berkas kepada majelis
6. Majelis Hakim:
  - a. Membuat PSH (Penetapan Hari Sidang) + perintah memanggil para pihak oleh jurusita.
  - b. Menyidangkan perkara.
7. Memberikan kepada meja II kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
  - a. Memutus perkara
8. Meja III
  - a. Menerima berkas yang telah diminta dari majelis hakim
  - b. Memberikan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita.
  - c. Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
  - d. Menetapkan kekuatan hukum.
9. menyerahkan salinan kepada penggugat dan tergugat dan instansi terkait.
  - a. Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum
10. Panitera Muda Hukum:
  - a. Mendata perkara

- b. Melaporkan perkara
- c. Mengarsipkan berkas perkara.<sup>52</sup>

### 3. Dasar Hukum Isbāt Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbāt nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>53</sup> Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbāt nikahnya ke Pengadilan Agama.” Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbāt nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.”<sup>54</sup>

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-

<sup>52</sup>Mukti Arto, *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 56.

<sup>53</sup>Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>54</sup>Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 172.

undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>55</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi, sahnya suatu akad nikah di Indonesia, harus memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama, dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif. Oleh karena itu menurut Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut Syari'at Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian bahwa akta perkawinan (Nikah) tersebut merupakan hal yang sangat penting menentukan akta kebenaran surat permasalahan apabila diperkarakan.<sup>56</sup>

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qūr'ān atau al-Sūnnāh tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mūdāyānāh*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk

---

<sup>55</sup> Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003), h. 70.

<sup>56</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 173.

mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.<sup>57</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dalam pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi, Perkara isbat nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian.

Didalam al-Qur'ān dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam QS.al-Bāqārāh/2: 282 berbunyi:

---

<sup>57</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 107.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kau menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.<sup>58</sup>

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *māslāhāhmūrsālāh* yang menurut al-Syātibi merupakan dalil *qāth'i* yang dibangun atas dasar kajian indukif (*istiqrā'i*)<sup>59</sup> dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

Isbāt nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, Ash-Shidqi, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2001), h. 39.

<sup>59</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatnikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### **4. Pencatatan Perkawinan**

Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b.dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>60</sup> Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam bukucatatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke

---

<sup>60</sup> M. anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Cet II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 19.



dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.<sup>61</sup>

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dan keturunannya dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga pencatatan perkawinan ini benar-benar adalah suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, yang diharapkan dapat melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri, atau salah satu yang tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>62</sup>

Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang

---

<sup>61</sup>M. anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h.24.

<sup>62</sup>M. anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 24.



ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.<sup>63</sup>

Dalam hal pencatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihattujuan dari pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **5. Legalisasi Perkawinan**

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA.

Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang

---

<sup>63</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 144.

dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.<sup>64</sup>

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *konkreto*. Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.

#### **6. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan**

Seperti yang termaktup dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

##### **a. Perkawinan dianggap tidak sah**

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

##### **b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu**

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan

---

<sup>64</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 67.

perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang Perkawinan).<sup>65</sup> Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah K pada tahun 2012 yang berjudul “*Pola Hidup Berorientasi Laut*” menyatakan bahwa persepsi orang tua Bajo sangat urgen untuk dipahami karena orang tua berperan sebagai penanggung jawab yang telah ditakdiran Allah swt. terhadap anak-anaknya maupun sebagai pendidik pertama dan utama yang mempunyai kepentingan terhadap kemajuan anak-anaknya, demi kesuksesan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Namun keadaan pendidikan sangat minim karena seluruh aspek kehidupannya hanya digantungkan pada mata pencarian sebagai nelayan.<sup>66</sup>

Dengan diadakannya isbāt nikāh di masyarakat Suku Bajo maka perkawinan yang mereka lakukan dapat efektif atau berdampak positif terhadap perkawinan, anak mereka bahkan tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam pembuatan kartu keluarga (KK) dan pembuatan Akta Kelahiran semakin efektif.

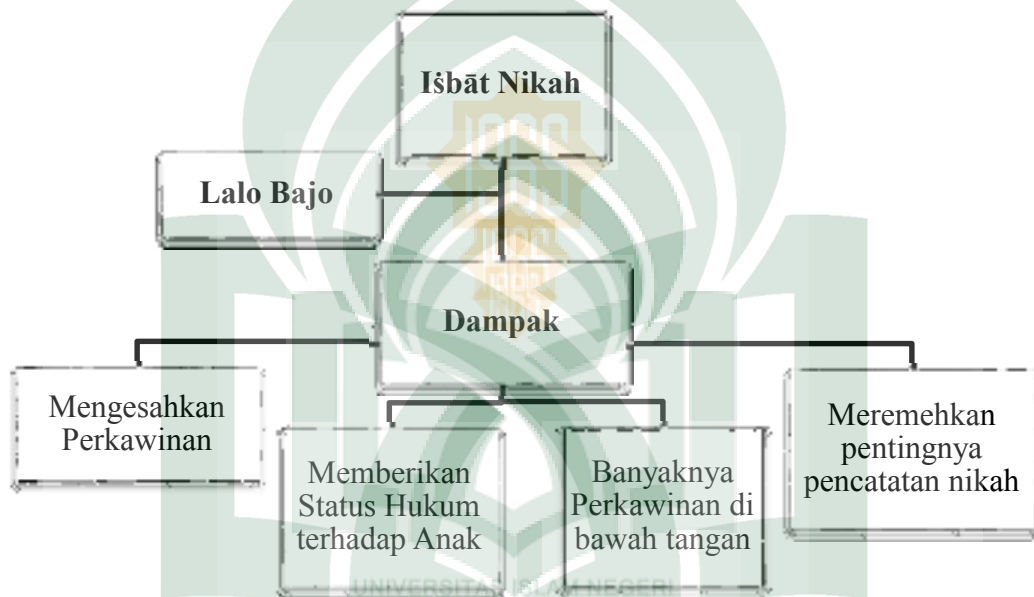
---

<sup>65</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 42 dan 43.

<sup>66</sup>Abdullah K, *Pola Hidup Berorientasi Laut*, (Makassar, 2012), h. 147-148

### C. Kerangka Konseptual

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Iṣbāt Nikah pada Masyarakat Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”**



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### **A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*Field Research Kualitatif Deskriptif*) atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis phenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.<sup>67</sup> Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur serta Penelitian dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bone. Pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan penulis bahwa Kecamatan tersebut mempunyai sistem Pelaksanaan adat istiadat yang sangat kental. Tradisi perkawinan dan turun laut (nelayan) karena masyarakat Suku Bajo terbilang masih memercayai tradisi ini turun-temurun dari nenek moyangnya.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah efektifitas isbat nikah terhadap masyarakat suku bajo berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang.

---

<sup>67</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Ed. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009), h. 28.

- b. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qūr'ān dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- c. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat sudut pandang kebudayaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur serta Penelitian dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bone. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yang di dapat langsung dari lokasi penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) dan (field research) yaitu dengan menghimpun data-data, buku-bukukarya ilmiah, dan pendapat para tokoh Adat istiadat yang mengetahui secara detail.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka penulis mempergunakan beberapa metode seperti:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data yang diadakan dengan cara pengkajian literature berupa buku-buku, majalah dokumen-dokumen dan semacamnya yang didapatkan melalui perpustakaan atau tempat-tempat lain, literature ini tentunya berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Field research, yaitu mengadakan pengumpulan data dengan terjun langsung di lapangan penelitian, dengan menggunakan teknik penyaringan data sebagai berikut :
  1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pada setiap perkawinan di lokasi penelitian dan pengambilan data di pengadilan agama tentang isbat nikah.
  2. Interview, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.<sup>68</sup> Yaitu melakukan percakapan dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

---

<sup>68</sup>Made Wirartha, *PedomanPenulisanUsulanPenelitian, SkripsidanTesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 37.



### **E. Instrumen Penelitian**

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan focus penelitian, pengumpulan data lapangan wawancara, observasi untuk memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>69</sup>

### **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu :

- a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian penulis.
- b. Analisis komparatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan data yang telah ada kemudian di tarik kesimpulan.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan

---

<sup>69</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. tm.* 2009, h. 306

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

b. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



## BAB IV

### EFEKTIVITA *SISBĀT* NIKAH PADA MASYARAKAT LALO BAJO DITINJAUAN DARI HUKUM ISLAM

#### A. *Gambaran Umum Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*

##### 1. Sejarah Lahirnya Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

Awal mula lahirnya Suku Bajo kira-kira sekitar pada Tahun 1968.<sup>70</sup> Asal usulnya berasal dari *ussu* ' atau Suku *Same* ' yang dikenal sekarang adalah Suku Bajo. *Saurigading* adalah namacerita/kisah terpanjang. Dan kononsaat itu dia ingin menikahi adik perempuannya tetapi tidak ada izin maka saat itulah *Saurigading* berlayar sehingga yang hanyut ke laut tersebut terdapat seorang wanita keturunan bangsawan yang bergelar *Lalo Sipapu*, yang kemudian terdampar bersama kelompoknya di wilayah kerajaan Bone.<sup>71</sup> Yang sekarang bernama Bajoe.

Wanita ini kemudian dipersunting oleh seorang pangeran dari kerajaan Bugis, hingga melahirkan keturunan yang bergelar *Lalo Bajo*. Mengetahui bahwa *Lalo Sipapu* adalah orang yang ditakdirkan untuk hidup mewarisi laut, raja Bone kemudian mewariskan kawasan laut kerajaan Bone. Keturunan *Lalo sipapu* yang bergelar *Lalo*

---

<sup>70</sup>Idris/Deri (65 tahun), Lalo Bajo, *Wawancara*, Bajoe, Tanggal 05 Juli 2017.

<sup>71</sup>Idris/Deri (65 tahun), Lalo Bajo, *Wawancara*, Bajoe, Tanggal 06 Juli 2017.

*Bajo* kemudian menyebar memimpin kelompok Bajo lainnya, yang tersebar di berbagai tempat.

Mata pencaharian utama suku Bajoe adalah mencari ikan dengan cara yang masih terbilang tradisional seperti memancing, memanah dan menjaring ikan. Sejak umur tujuh tahun anak-anak mereka belajar menangkap ikan dan menjual hasilnya, mereka juga mengakui mencari ilmu pengetahuan penting tetapi pengetahuan menangkap ikan lebih penting karena menyangkut kelangsungan hidup mereka.<sup>72</sup>

Kehidupan Suku Bajoe memang masih terbilang sangat sederhana. Mendirikan pemukiman tetap mungkin tak terpikir oleh mereka apabila tidak dihimbau oleh Pemerintah setempat. Suku Bajoe yang mendapat sebutan *sea nomads* atau manusia perahu karena sejak zaman dahulu mereka adalah petualang laut sejati yang hidup sepenuhnya di atas perahu sederhana. Mereka berlayar berpindah-pindah dari wilayah perairan yang satu dan lainnya. Perahu adalah rumah sekaligus sarana mereka mencari ikan di luas lautan yang ibaratnya adalah ladang bagi mereka. Ikan-ikan yang mereka tangkap akan dijual kepada penduduk di sekitar pesisir pantai atau pulau. Inilah asal mula mereka disebut sebagai manusia perahu atau *sea nomads*.<sup>73</sup>

Suku Bajo adalah suku yang mempunyai identitas khusus yaitu berupa panji atau bendera yang disebut dengan *Ula-ula*, yang merupakan lambang utama dan

---

<sup>72</sup>Abdullah K, *Suku Bajo di Kabupaten Bone Dan Pola Penghidupannya*, (Cet 1; Makassar: 1990), h. 2.

<sup>73</sup><http://sejarah.iniblogspot.co.id/2013/06/suku-bajo.html>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

tanda pengenal khusus bagi orang Bajo. Bendera tersebut di kibarkan pada waktu berlayar, dan pesta baik hitaman, maupun pesta perkawinan.<sup>74</sup>

Dahulu masyarakat suku Bajo yang seluruhnya bekerja sebagai nelayan, warisan seperti perahu, pukot, dan alat-alat produksi lainnya relatif lebih penting dibanding dengan tanah. Persepsi orang tua Bajo atau Tokoh Adat bahwa hidup di laut penuh kebebasan dan keaktifan mencari nafkah, tanpa di batasi oleh waktu dan ruang atau aturan dan norma.

## 2. Letak Geografis

Suku Bajo berada di wilayah Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, letak perkampungan Bajo adalah di sisi kanan tanggul dermaga pelabuhan Bajoe, terus ke selatan hingga perbatasan Kampung Pao. Secara geografis Kelurahan Bajoe berbatasan beberapa Kelurahan yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bajoe,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kading,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cellu, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Masyarakat Suku Bajoe yang tersebar disatu desa, yaitu desa Pao. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang rata-rata dilakoni masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe. Menurut pengamatan peneliti, anak-anak dibimbing melakukan pekerjaan sebagai nelayan sejak kecil yakni usia 10 atau 11 tahun. Anak-anak yang

---

<sup>74</sup>Hasdi, *Peranan Lalo Bajo Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam. (Suku pada Suku Bajo di Kelurahan Bajoe kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone)*, skripsi, STAIN Watampone, 2016, h. 12.

putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus membantu orang tuanya mencari rezeki sebagai nelayan.

Tabel Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone		
Nama Suku	Jumlah Penduduk khususnya Suku Bajo	Luas Area/Lokasi Suku Bajo
Bajo	1288 Jiwa	Sekitar dua hekto area (Ha), dengan 280 KK.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Bajoe terdiri atas enam lingkungan yaitu: Appasaareng, Tengnge, Roompe, Maccedde, Pao, dan Bajo. Jarak wilayah Bajoe ke kota Watampone sebagai ibu kota kabupaten relative sangat dekat sekitar 6 km. Dan dapat ditempuh dalam jangka waktu yang sangat singkat dan bias menggunakan mobil maupun motor.

### **3. Jumlah Penduduk di Kelurahan Bajoe**

Luas Wilayah Kelurahan Bajoe sekitar dua hekto (Ha), dengan jumlah penduduk 1288 jiwa 280 kepala keluarga (KK), dengan klasifikasi jenis kelamin laki-laki 638 dan perempuan 650 jiwa.

#### **B. Pemahaman Masyarakat Suku Bajo tentang Perkawinan**

Persepsi masyarakat Suku Bajo terhadap pengetahuan, pemahaman, serta penjelasan tentang perkawinan itu sendiri adalah sangat urgen untuk di pahami karena orang tua Bajo sebagai pemimpin dan penanggung jawab terhadap masyarakat hanya

memahami bahwa perkawinan itu sendiri adalah sebuah ikatan antara suami dan istri dan bertujuan untuk mendapatkan keturunan serta orang yang sudah mampu memberi nafkah sehingga dapat disebut pernikahan.<sup>75</sup>

Dalam melakukan pernikahan masyarakat Suku Bajo tidak menggunakan *Baruga* atau tidak melangsungkan pernikahannya di gedung-gedung mereka menggunakan kertas minyak yang sudah dibentuk sebagai hiasan yang digantung disisi rumah mereka dan masih tergolong tradisional mereka juga punya ciri khas saat pernikahan berlangsung yaitu dengan bunyian gendang, walaupun sekarang sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit.

Idris alias Deri selaku Kepala Suku mengatakan bahwa:

Pernikahan yang sering terjadi di Suku Bajo adalah pernikahan lari/silariang dimana kedua belah pihak yang saling suka dan tidak ada restu dr salah satu pihak sehingga mereka lari ketempat lain disanalah mereka melangsungkan pernikahan. Bahkan bukan saja pernikahan silariang yang sering terjadi hanya karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan yang sah secara hukum.<sup>76</sup>

Hal ini senada yang dikatakan oleh Justang sekaligus warga asli Suku Bajo:

Pernikahan itu adalah sebuah ikatan suami istri yang sama-sama mampu menjalankan tugas dalam rumah tangga serta mampu dalam hal menafkahi keluarga kami.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Deri (65 tahun), Kepala Suku Bajo/Lalo Bajo, *Wawancara*, Bajoe, Tanggal 22 Juni 2017.

<sup>76</sup>Idris/Deri (65 tahun), Lalo Bajo, *Wawancara*, Bajoe, Tanggal 22 Juni 2017.

<sup>77</sup>Justang (30 tahun), Masyarakat Asli Suku Bajo, *Wawancara*, Bajoe, Tanggal 22 Juni 2017.



Hal ini senada yang dikatakan oleh ibu Yuni:

Perkawinan merupakan hal yang wajib dijalankan oleh suami istri dalam hal kewajiban rumah tangga serta kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya.<sup>78</sup>

Menurut Basri selaku masyarakat kampung bajo, perkawinan menurutnya bahwa pasangan suami istri yang telah menikah dan menjalankan kewajibannya masing-masing.<sup>79</sup>

Awaluddin Ramadhan mahasiswa STAIN watampone yang berasal dari suku bajo memahami bahwa perkawinan itu adalah sepasang suami istri yang telah melakukan pernikahan secara agama, mempunyai wali, di saksi oleh 2 (dua) orang saksi dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.<sup>80</sup>

Jadi, perkawin itu adalah suatu ikatan batin antara suami istri dari haram menjadi halal. Perkawinan juga merupakan akad yang kuat atau *mistaqan ghalizan* dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Dalam QS.an-Nisa/4:1 berbunyi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>78</sup>Yuni (28 tahun), Masyarakat Suku Bajo, *Wawancara*, Bajoe.Tanggal 22 Juni 2017.

<sup>79</sup>Basri (30 tahun), Masyarakat Suku Bajo, *Wawancara*, Bajoe.Tanggal 23 Juni 2017.

<sup>80</sup>Awaluddin Ramadhan (20 tahun), Mahasiswa STAIN Watampone, Masyarakat Suku Bajo, *Wawancara*, Bajoe.Tanggal 23 Juni 2017.

Terjemahnya :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Oleh karena itu dalam hal pernikahan harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh 2 dimesi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau *stabilitas*.<sup>81</sup>

Data Nama-nama Mengenai Kasus Pernikahan Yang Tidak Tercatat Di KUA pada Suku Bajo				
Jenis Kelamin				
No.	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
1.	Tola (L) Dari (P)	40 Tahun 38 Tahun	Tidak tamat SD	Bajoe
2.	Bulluna (L) Pida (P)	45 Tahun 38 Tahun	- SD	Bajoe
3.	Lenggen (L) Siti (P)	38 Tahun 30 Tahun	SD SD	Bajoe
4.	Ngeleng (L) Ngore (P)	38 Tahun 35 Tahun	- -	Bajoe
5.	Yuyu (L) Rasti (P)	30 Tahun 35 Tahun	Tidak tamat Tidak tamat	Bajoe
6.	Rusta (L) Wati (P)	30 Tahun 28 Tahun	- Tidak tamat	Bajoe
7.	Nadira (P) Jumardi (L)	28 Tahun 31 Tahun	Tidak tamat -	Bajoe

---

<sup>81</sup> Jaih Mubarak, *modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 17.

8.	Ruse (L) Risna (P)	35 Tahun 30 Tahun	- Tidak tamat	Bajoe
9.	Nani (P) Mawir (L)	25 Tahun 30 Tahun	SD	Bajoe
10.	Yecce (P) Saripuddin (L)	29 Tahun 35 Tahun	Tidak tamat -	Bajoe
11.	Akbar (L) Ratni (P)	30 Tahun 26 Tahun	SD SD	Bajoe
12.	Juma (L) Suriani (P)	35 Tahun 30 Tahun	Tidak tamat -	Bajoe
13.	Jase (L) Sannati (P)	38 Tahun 30 Tahun	- Tidak tamat	Bajoe
14.	Wandi (L) Sania (P)	29 Tahun 30 Tahun	- SD	Bajoe
15.	Caddi (L) Eccelenggan (P)	29 Tahun 27 Tahun	- Tidak tamat	Bajoe
16.	Bacota (L) Minmin (P)	28 Tahun 25 Tahun	Tidak tamat SD	Bajoe
17.	Ramli (L) Rita (P)	28 Tahun	SD SD	Bajoe
18.	Herman (L) Erni(P)	27 Tahun 23 Tahun	SD SD	Bajoe
19.	Jutan (L) Ani (P)	28 Tahun 25 Tahun	SD	Bajoe

Data-data masyarakat Suku Bajo yang tidak tercatatkan perkawinannya dari hasil penelitian penulis bahwa memang yang menjadi masalah utama pada masyarakat disana adalah pemahaman tentang pernikahan itu sendiri disebabkan karena rendahnya pendidikan, pengetahuan sehingga masyarakat mengalami kekeliruan dalam hal perkawinan.

Pernikahan adalah hal yang wajib untuk dicatatkan karena untuk melindungi dari *fitnah* dan *tuhmah qadzaf zina* (tuduhan zina).Maka jelaslah bahwa pencatatan

nikah untuk mendapatkan akta tersebut sangat penting untuk *saddu zari'ah* (tindakan pencegahan) dan juga *maslahah mursalah* (kemaslahatan umat).

Dari beberapa pendefinisian perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam, mengandung tiga aspek:

a. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suami masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

b. Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting yaitu: 1) Dilihat dari penilaian umum, berpendapat bahwa orang yang mealukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada meraka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis terbatas. 2) Sebelum adanya peraturan

tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut sejarah agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarakat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.

c. Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan itu mempunyai tiga kriteria yang khusus yaitu:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketantuan yang sudah ada hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>82</sup>

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI menerangkan bahwa pencatatan nikah adalah hal yang sangat penting bagi pernikahan, yaitu “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Jelas, tujuan utama dari adanya

---

<sup>82</sup>Muh. Jamal Jamil, *Kolerasi Hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Alauddin University Press, 2001), h. 21-22

pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan.<sup>83</sup> Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain peraturan perundangan-undangan itu dibuat bukannya tanpa tujuan.

Pernikahan adalah hal yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. yang dimana *Sahih/sah* ialah perkawinan yang memenuhi segenap *rukun* (syarat mutlak/syarat materiil) dan memenuhi segenap *syarat* formil nikah.

Apabila syarat materiil (*rukun*) tidak terpenuhi tidak ada nikah, sedangkan kalau syarat formil yang tidak dipenuhi (misalnya pencatatannya) dapat dibatalkan (*fāsid*). Jadi, Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>84</sup>

Dalam hal perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat Suku Bajo itu sendiri merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat dikenakan Pasal 530 KUHP bahkan mengancam pidana bagi petugas agama yang melangsungkan upacara perkawinan sebelum dinyatakan kepadanya bahwa telah dilangsungkan lebih dulu upacara perkawinan di Catatan Sipil.<sup>85</sup> Dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan berbunyi:

<sup>83</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 252.

<sup>84</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 14-15.

<sup>85</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, h. 17.

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>86</sup>

Jadi, perkawinan adalah hal yang wajib dicatatkan oleh Pegawai pencatat Nikah sebagai syarat sahnya perkawinan baik secara hukum maupun secara agama.

### ***C. Efektivitas Isbāt Nikah terhadap Perkawinan Masyarakat Suku Bajo***

Isbāt nikah merupakan pengesahan/penetapan perkawinan bagi yang melakukan pernikahan di bawah tangan dengan adanya Isbāt nikah maka masyarakat dapat mengesahkan perkawinannya dan sangat berdampak terhadap pernikahan itu sendiri.

Senada yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone:

Dengan adanya *Yandu* (Pelayanan Terpadu) maka sangat efektif terhadap masyarakat Suku Bajo dalam pengurusan Isbāt nikah karena biaya yang ringan, cepat dan sederhana.<sup>87</sup>

Isbāt nikah salah satu alternatif pemecahan masalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Sementara bidang muamalat dalam kasus-kasus tersebut, diperintahkan untuk mencatatnya, antara lain seperti firman Allah dalam al-Quran al-Karim yang memerintahkan untuk mencatat suatu transaksi yang dilakukan

---

<sup>86</sup>Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, h. 18.

<sup>87</sup>Syamsiar, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *Wawancara*, Bone. Tanggal 08Juli 2017.



dengan tidak tunai harus dicatat dan transaksi itu harus pula disaksikan dengan dua orang laki-laki yang adil sebagai saksi. (QS. al-Baqarah, 2:282).<sup>88</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban lembaga perkawinan. Dapat dipahami, bahwa *Isbāt nikah* itu sangat diperlukan sebagai jalan keluar dari permasalahan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, yang masih ditemukan dalam masyarakat, karena sebab-sebab tertentu, agar orang-orang yang tidak berdosa jangan sampai kehilangan hak-haknya sebagai akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

Dari segi peraturan perundang-undangan, *Isbāt nikah* mempunyai landasan yuridis yang kuat, yakni Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari segi sosial karena banyak masyarakat yang membutuhkannya, apabila pernikahan hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya lembaga *Isbāt nikah* maka dapat menimbulkan kesulitan sosial. Dan dari segi moralnya adalah tanggung jawab adanya keinginan ikut membantu masyarakat yang membutuhkan pencari keadilan untuk kepastian hukum status perkawinan, status harta perkawinan/*gono gini*, status anaknya, serta warisan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Mawardi Amien, *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapan dalam Pengadilan)*, (Jakarta: Publitbang Hukum dkk, 2012). h. 27.

<sup>89</sup>Mawardi Amien, *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapan dalam Pengadilan)*, h. 52.

Hal ini senada yang dikatakan oleh Bapak Jamaluddin, selaku hakim di pengadilan agama watampone kelas 1 A.

Bahwa dengan adanya Isbāt nikah sangat berdampak/berpengaruh positif untuk masyarakat karena dilihat dari segi penetapan/pengesahan perkawinannya sendiri, pembuatan KK (kartu keluarga), pembuatan akta kelahiran, naik haji serta dalam hal pembagian dana bantuan dari kepala desa/kelurahan masing-masing daerah. Terutama untuk masyarakat Suku Bajo itu sendiri.<sup>90</sup>

Secara singkat pandangan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A mengenai efektivitas Isbāt nikah masyarakat Suku Bajo serta solusinya, dilihat dari table berikut:

---

<sup>90</sup> Jamaluddin, SE, SH., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Wawancara, Bone. Tanggal 09 Juli 2017.

No.		Pandangan	
	Hakim	Dampak	Solusi
1.	Syamsiar	<p>1. Masyarakat cenderung menggampangkan dan meremehkan pentingnya pencatatan nikah ini.</p> <p>2. Dampak positifnya mereka pasti bahagia karena perkawinan yang mereka telah lakukan diisbatkan pernikahannya dan mendapatkan akta nikah atau pengakuan hukum.</p>	<p>Dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat Suku Bajo bahwa pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi), sah secara agama mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Penyuluhan pada masyarakat tentang hal ini harus tetap digalakkan secara terpadu dengan melibatkan para pihak dan instansi yang berkompeten. Supaya masyarakat tidak mengulangi hal tersebut.</p>

2.	Jamaluddin	<p>1. Sangat berdampak positif bagi masyarakat dengan adanya Isbāt nikah karena memberikan perlindungan hukum terhadap anaknya.</p> <p>2. Mendapatkan perlindungan hukum untuk perkawinannya,</p>	<p>Harus dilakukan penyuluhan yang rutin terkhusus untuk masyarakat Suku Bajo sendiri agar pemahaman tentang pernikahan itu penting seperti melalui pengajian-pengajian selalu disinggung mengenai pentingnya pencatatan nikah</p>

		<p>dalam hal pembuatan KK serta dalam hal pengurusan-pengurusan lainnya.</p> <p>3. Sedangkan dampak negatifnya dimana masyarakat seolah-olah memperlakukan hukum islam yang asalnya nikah dibawah tangan itu boleh tetapi di salah gunakan.</p> <p>4. Menganggap pencatatan nikah tidak penting, karena sudah menikah sah secara agama. Dan dampak negatifnya lagi bahwa masyarakat beranggapan tentang pernikahan yang sudah terjadi karena nantinya bisa di Isbātkan.</p>	<p>yang resmi menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku agar msyarakat tahu akan pentingnya pencatatan nikah. Harus diadakan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, kepada masyarakat Indonesia tapi terkhusus lagi kepada masyarakat Suku Bajo agar dampak negatif yang ada dapat diminimalisir.</p>
--	--	---	--

Maka dari itu, masyarakat suku Bajo besar pengaruhnya terhadap pengesahan perkawinannya, karena dengan adanya buku nikah sangat mudah dalam pembuatan KK, pengurusan akta kelahiran, penetapan ahli waris, pengurusan naik haji, serta pemberian bantuan.

Dalam hal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Bajo terhadap perkawinan itu sendiri adalah hal yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum sebab tidak mencatatkan perkawinannya di pegawai pencatat nikah.

Masyarakat Suku Bajo adalah suatu suku yang dimana pemahaman mereka tentang pernikahan itu sendiri sangat kurang karena pendidikan mereka pun banyak yang putus disebabkan pemahaman yang mereka miliki hanyalah tentang bagaimana cara untuk mendapatkan biaya kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya Isbāt nikah yang dilakukan oleh pengadilan agama, masyarakat itu sendiri dengan mudahnya untuk dapat menetapkan perkawinannya. Dan sangat berdampak positif terhadap pernikahan bahkan terhadap pembuatan KK, serta terhadap anak-anak mereka.

Masyarakat yang sudah melakukan Isbāt nikah adalah salah satunya Bapak Saruddin bin Samsu:

Menurutnya adalah dengan adanya Isbāt nikah saya pribadi sangat bahagia karena sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan

yang telah saya lakukan serta sangat mudah untuk membuat KK dan berdampaknya lagi untuk anak-anak saya.<sup>91</sup>

Isbāt nikah itu sendiri berfungsi sebagai kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil ini bersifat procedural dan administratif.<sup>92</sup>

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yakni:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Sebaiknya perkawinan yang tidak tercatat dan tidak diminta Isbat nikahnya maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>91</sup>Saruddin (35 tahun), Masyarakat Suku Bajo, *Wawancara*, Bajoe. Tanggal 19 Juli 2017.

<sup>92</sup>Hamdan Kurniawan Z (10400111017) meneliti tentang “*Permohonan Isbāt Nikāh dalam Pernikahan Siri Pasca Berlakunya UU No. 30 Tahun 2006*” (*Studi Kasus Perkara No. 523/Pdt.P/2014 PA Mks*, 2015), h. 24.



3. Tidak adapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai istri dan juga anak-anaknya.<sup>93</sup>

Dari keterangan atau data-data mengenai Isbāt nikah yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam hal Isbāt/sidang keliling terkhusus pada masyarakat Suku Bajo yang dilakukan pada tanggal 1 oktober 2015. Yang dimana masyarakat yang di Isbātkan perwakilannya sekitar 50-an dan 2 majelis hakim yang turun saat itu salah satunya Pak Jamaluddin sendiri selaku hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.<sup>94</sup>

Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya tetapi apabila tidak dicatatkannya, maka pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak dimasyarakat.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup>Ahmad Mukti Aryo, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan* (Mimbar Hukum No. 28, 2008), h. 51-52.

<sup>94</sup>Jamaluddin, *Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Wawancara*, Bone. Tanggal 10 Juli 2017.

<sup>95</sup>Mawardi Amien, *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapan dalam Pengadilan)*, (Jakarta: Publitbang Hukum dkk, 2012). h. 27

#### **D. Analisis Hukum Islam tentang Efektifitas *Isbāt Nikah* pada masyarakat Suku Bajo**

Sebagaimana telah dipaparkan beberapa aspek sosiologis yang melatarbelakangi masyarakat Suku Bajo melakukan praktek perkawinan dibawah tangan sehingga mewajibkan melakukan *isbātnikah* untuk memenuhi kebutuhan administrasi urusan keluarga serta demi mempunyai kekuatan hukum, maka mereka mengajukan *isbātnikah* ke pengadilan agama setempat. Oleh sebab itu dalam mengabulkan permohonan *isbātnikah*, majelis hakim menggunakan epistemology hukum islam dengan metode *Istislah* atau *Maslahat* berdasarkan konsep *maqasidus syari'ah* (tujuan hukum) dalam islam. Dalam konsep *maqasidus syar'iah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia sekitarnya.

Menurut hemat penulis, efektivitas *isbāt nikah* yang belum mendapatkan akte nikah sangat bermanfaat bagi masyarakat suku bajo dengan tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan yang penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat suku bajo yang notabene memiliki pendidikan yang minim soal perkawinan.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan, hukum Islam dianalogikan kepada pencatatan dalam persoalan muda-mudahan (utang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS.al-Baqarah 2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Amin Summa mengatakan bahwa, benar ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan khususnya yang dilakukan dalam bentuk pengkreditan/hutang piutang (*mudayanah*), namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktivitas administratif (catat-mencatat) ini dalam transaksi-transaksi lainnya. Termasuk di dalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan.<sup>96</sup>

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lainnya harus dicatatkan, mestinya aqad nikah yang begitu luhur, agung dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Maqasidu syariah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syariah dan juga tidak dilarang oleh syariah. Semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan.

“Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

---

<sup>96</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005). h. 188

Berdasarkan kemaslahatan maka efektivitas isbāt nikah merupakan kebutuhan yang bermanfaat dharuri (mendesak). Dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orangtua dengan anak, kewarisan dan lain-lain.

Asas maslahat dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum islam tetap sejalan dengan maqasidu syariah perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum islam sesuai dengan kaidah fikih mengatakan: *“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”*.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan kerteriban hukum juga mempunyai manfaat prefentif, seperti tidak terjadinya penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. menghindarkan adanya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak.

Dengan demikian isbātnikah mengandung manfaat atau kemaslahatan kebaikan yang besar dalam masyarakat sebaliknya apabila tidak dilakukan Isbātdan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-phak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka bagi setiap warga Negara khususnya umat Islam, wajib hukumnya melakukan perkawinan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan pegawai-pegawai harus mencatat perkawinan yang dilakukannya sesuai peraturan perundang- undangan. Apabila status perkawinan seseorang tidak diakui secara formal maka akan menimbulkan kerusakan pada nasab, harta dan kehormatan. Oleh karena itu isbātnikahterhadap masyarakat suku bajo tersebut dari sudut hukum Islam sangat efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan pernikahan dalam hukum Islam.

Ajaran Islam melembagakan asas publisitas itu dengan perintah untuk meresmikan suatu perkawinan, dalam suatu hajatan/syukuran yang dihadiri oleh masyarakat disekitarnya. Dengan demikian tidak ada istilah kawin sirri dalam konsep Islam, tetapi pencatatan perkawinan pada masa lalu belum dilembagakan dalam fikih konvensional.<sup>97</sup>

Sehubungan dengan perintah pencatatan semua perikatan dalam ayat itu, Amin Summa menyatakan, bahwalagi pula kaidah hukum Islam menyatakan:

"الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ"

Maksudnya, pemahaman sebuah ungkapan (teks) didasarkan pada keutamaan teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya. Lagi pula seperti ditegaskan

---

<sup>97</sup>Mawardi Amien, *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapan dalam Pengadilan)*, h. 19.

oleh Imam Malik, akad yang paling banyak persamaanya dengan akad jual beli adalah akad nikah.<sup>98</sup>

Jadi didalam hukum Islam dampak dari isbāt nikah itu merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dimana perkawinannya yang hanya sah secara agama/syara' akan tetapi dengan adanya isbāt nikah dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang kurang dalam pemahaman tentang perkawinan itu sendiri dalam hal pengesahan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau kepastian hukum, mempunyai kekuatan hukum bagi yang bersangkutan, status anak yang dari perkawinan tersebut diakui, status harta bersama diakui keberadaannya tersebut dan waris malwaris diakui pula. Begitu pun dengan administratifnya memiliki akta otentik.

Memperhatikan efektivitas isbāt nikah dalam perkawinan di atas maka dapat dipahami dampak positif dan negatif yaitu:

1. Dampak positifnya mereka pasti bahagia karena perkawinan yang mereka telah lakukan diisbātkan pernikahannya dan mendapatkan akta nikah atau pengakuan hukum.
2. Sangat berdampak positif bagi masyarakat dengan adanya Isbāt nikah karena memberikan perlindungan hukum terhadap anaknya.
3. Mendapatkan perlindungan hukum untuk perkawinannya, dalam hal pembuatan KK serta dalam hal pengurusan-pengurusan lainnya.

---

<sup>98</sup>Mawardi Amien, *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapan dalam Pengadilan)*, h. 20.

Sedangkan dampak negatif yaitu:

1. Menganggap pencatatan nikah tidak penting, karena sudah menikah sah secara agama.
2. Dampak negatifnya lagi bahwa masyarakat beranggapan tentang pernikahan yang sudah terjadi karena nantinya bisa di Isbātkan.
3. Dampak negatifnya dimana masyarakat seolah-olah mempermainkan hukum islam yang asalnya nikah dibawah tangan itu boleh tetapi di salah gunakan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah diuraikan adalah:

1. Bahawa masyarakat Suku Bajo yang berada di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Dalam melaksanakan proses perkawinan sesuai tingkat pemahaman mempelai dan sangat sedikit yang memahami konsep perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang apalagi proses perkawinan secara syar'i. Pemahaman masyarakat Suku Bajo mengenai perkawinan adalah hal yang sangat penting ditunaikan setiap umat manusia akan tetapi pemahaman mereka sangatlah minim tentang pernikahan itu sendiri di karenakan pengetahuan yang kurang dan hanya berpikir tentang bagaimana cara dapat menafkahi istri.
2. Pelaksanaan isbat nikah terhadap masyarakat suku bajo khususnya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA terbilang sangat efektif. Sehingga masyarakat sukubajo dengan mudah mendaftarkan diri ke pengadilan agama guna melakukan isbat nikah agar mendapatkan legalitas hukum dan akta nikah. Dengan adanya isbat nikah masyarakat suku bajo memanfaatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum sebagai pasangan yang sah dan bermanfaat dalam pengurusan surat-surat dari kantor pemerintah

setempat. Seperti akta kelahiran bagi anak- anak mereka, kartu keluarga, KIS dan lain.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Kepada pemerintah bahwa masyarakat Suku Bajo yang berdomisili daerah Bajoe kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan formal. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi pernikahan dibawah tangan tanpa mencatatkan ke kantor KUA setempat yang mengakibatkan keluarga mereka sulit mendapatkan kartu identitas sebagai warga Negara. Maka dari itu butuh pendekatan khusus untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan bukan malah membuli atau membiarkan. Dan perlu kiranya pemerintah melakukan penertiban kepada imam-imam yang telah melakukan praktek menikahkan pasangan suami istri tanpa sepengetahuan kantor KUA setempat.
2. Isbāt nikah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama tentunya sangat berpengaruh untuk masyarakat Suku Bajo yang telah melakukan pernikahan dibawah tangan, tidak hanya berjalan sendiri, perlu kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sesuai ketentuan yang berlaku. Maka harus dilakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar supaya berefektif.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Quran

Ali, Mukti. *Suatu Etnografi Suku Bajo*, Cet. 1; Jawa Tengah: STAIN Salatiga PRESS, 2010.

Abdullah K. *Suku Bajo di Kabupaten Bone Dan Pola Penghidupannya*, Cet. 1; Makassar: 1990.

Tihami & Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap)*, Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Jamil, Muh. Jamal. *Kolerasi Hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I; Alauddin University Press, 2001.

Ahmad, Mahtuf & Ny. Maria Ulfa. *Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya)*, Surabaya: Terbit Terang, t. th.

Kementerian Agama RI, Al-Hasib, *al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna*. Jakarta: Samad, 2014.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Perdata Hukum Perkawinan Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Amin, Ma'ruf. *Kompilasi Hukum Islam (MUI)*, (Cet terbaru; Jakarta: Permata Press, 2003).

Zakiah Drajat dkk. *Ilmu Fikih*, Jilid III; Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", dalam Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet I; Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Cahaya Agency, 2013.
- Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Agama RI, Ash-Shidqi, *al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2001.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Salim, Nasrudin. *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. IV; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangny*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- al-Qasimiy, Muhammad Jalaluddin. *Mahasin al-Ta'will*, jilid XII Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Mahalli, Ahmad Mudja. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*. Cet. I; Jakarta: Predana Medika, 2004.

Amien, Mawardi. *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapan dalam Pengadilan)*. Jakarta: Publitbang Hukum dkk, 2012.

M. anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

al-Bukhary, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhary*, juz VI; Beirut: Dai al-Fikr, 1994.

### Undang Undang

Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 1 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 64 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 42 dan 43 tentang Perkawinan.

### Referensi Situs Internet

H Hermansyah, Sejarah dan Asal Usul Suku Bajo, 2015, <http://sejarahini.blogspot.co.id/2013/06/suku-bajo.html>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

MM Hasyim, Landasan Teori tentang Isbat Nikah- 2014, <http://C:\Users\user\Downloads\Documents\Bab2.pdf>. Diakses pada tanggal 17Maret 2017.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Kantor Camat Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone



### 2. Pemukiman Suku Bajo dan Suasana Kampong Bajo







### 3. Lalo Bajo/Kepala Suku Bajo







Kepala Suku Bajo Bapak Idris/Deri

#### 4. Masyarakat Suku Bajo



Wawancara dengan Masyarakat Suku Bajo  
yang pernikahannya di bawah tangan



Kreatifitas Masyarakat Suku Bajo, bahan-bahannya berasal dari laut

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

## 5. Hakim-hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A



Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, SH, M.Ag, SE.



Wawancara dengan Ibu Syamsiar, SH.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS ISBAT NIKAH PADA MASYARAKAT LALO BAJO, KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR, KABUPATEN BONE", yang disusun oleh Egatuti Widiawati, NIM: 10100114017, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah diperiksa secara seksama, diteliti, dan disetujui untuk dimunqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 14 Maret 2018  
26 Jumadil Akhir 1439H

Penguji I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag (.....)  
Penguji II : Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A (.....)  
Pembimbing I : Drs. Hj. Hartini, M.H.I. (.....)  
Pembimbing II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M. Ag (.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M. H. I.  
Nip. 196503021994031003





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7078/S.01P/P2T/05/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

1. Bupati Bone
2. Ketua Pengadilan Agama Watampone

4-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.298/1919/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : EGATUTI WIDIAWATI  
Nomor Pokok : 10100114017  
Program Studi : Peradilan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muhi Yasin Limpo No. 30 Semata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah Kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH PADA MASYARAKAT BUKU BAJO KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Mei s/d 20 Juni 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ditandatangani di Makassar  
Pada tanggal : 23 Mei 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Supra Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Np : 19610513 199002 1 002

Tersusun Yth.  
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar  
2. Perpipal

30040 P/13P/20-05-2017



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://g2th.pmd.sulprov.go.id> Email : [g2t\\_prov.sulsel@ya.co.id](mailto:g2t_prov.sulsel@ya.co.id)  
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. 0491 - 25056

BUKTI PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN

Nomor Registrasi	3245/REG/VI/DPMPTSP/2017
Nama Pemohon	EGA TUTI WIDIAWATI
Alamat Pemohon	Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Kel. Samata Kec. Sungguminasa Kab. Gowa
Jenis Izin	Izin Penelitian (IP)
Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja
Tanggal Daftar	02 Juni 2017
Keterangan :	

Petugas Loker

ARINI ALIAS

*\*Kembaren ini wajib dikembalikan/diperbaharui saat pengambilan Surat Izin*

ALA UDDIN  
M A K A S S A R



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR**

Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Kode Pos 92716 Telp. (0481) 2912663

Bajo, 08 Juli 2017

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. 161 / TRT / IX / 2017

Camat Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, menerangkan bahwa:

Nama : EGATUTI WIDIAWATI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 10100114017  
Pekerjaan : Mahasiswa IJIN Alauddin Makassar

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan judul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH PADA  
MASYARAKAT SUKU BAJO KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN  
BONE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat,  
  
**HASRIWATI RAMLI S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.IV/b  
NIP. 196906171989082001





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.547/MIP/DPMPTSP/2017

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

**Nama :** EGA TUTI WIDIJAWATI  
**NIP/Nim/Nomor Pokok :** 101001114017  
**Jenis Kelamin :** Perempuan  
**Alamat :** Jl. Muh. Yassin Limpo No. 38 Kel. Samata  
Kec. Sungguminasa Kab. Gowa  
**Pekerjaan :** Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH PADA  
MASYARAKAT SUKU BAJO KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR  
KABUPATEN BONE "**

Lamanya Penelitian : 02 Juni 2017 s/d 02 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian harus melapor pada Camat Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
2. Menasati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) Lembar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 02 Juni 2017

KEPALA

**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717-198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
4. Camat Tanete Riattang Timur Kab. Bone di Lonrae
5. Arsip.

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Isbat Nikah pada Masyarakat Suku Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone"

Narasumber : Lalo Bajo dan Masyarakat Suku Bajo

Tanggal :

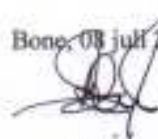
Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat suku bajo tentang perkawinan?
2. Bagaimana efektivitas isbat nikah pada masyarakat suku bajo?

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan itu sendiri?
2. Apakah menurut bapak/ibu tentang isbat nikah?
3. Apakah menurut bapak/ibu perkawinan itu?
4. Apakah sering terjadi perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Suku Bajo?
5. Apakah ada perbedaan perkawinan pada masyarakat Suku Bajo dengan masyarakat lainnya dalam hal acara perkawinan?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya isbat nikah apakah sangat berpengaruh atau tidak?
7. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat suku bajo?
8. Seberapa besar pengaruh terhadap efektivitas isbat nikah pada masyarakat suku bajo yang diajukan ke Pengadilan agama?
9. Apa saran bapak/ibu untuk pasangan yang nikah di bawah tangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat suku bajo?
10. Dampak/pengaruh-pengaruh apa saja yang ditimbulkan dengan adanya isbat nikah?

Bone, 08 Juli 2017



IDRIS  
Lalo Bajo

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Isbāt Nikah pada Masyarakat Lalo Bajo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”** bernama Egatuti Widiawati, NIM:10100114017, merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara. Terlahir dari kedua orang tua yang teramat mulia, ayahanda Muh. Mallawing dan Ibunda Hj. Mase Ati, penulis dilahirkan di Desa Kajuara Kecamatan. Awangpone Kabupaten. Bone pada tanggal 07 Juli 1997.

Penulis sempat menempuh jenjang pendidikan di MI Ar-Rahman 10 Kajuara, di Kabupaten Bone pada tahun 2002-2008, selanjutnya di Mts Al-Ihsan Kajuara Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 kemudian pada tingkat SLTA penulis melanjutkan studinya di SMA Pesantren Putri Al-Manawwarah Bone pada tahun 2012-2014, dengan tahun yang sama yakni tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan hingga tahun 2018.

Selama penulis menyandang status sebagai mahasiswa jurusan Peradilan Fakultas Syari’ah dan Hukum penulis pernah bergelut pada Organisasi Intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan periode 2015-2016 sebagai Anggota Koordinator Keilmuan, periode 2016-2017 menjabat sebagai Wakil Sekertaris 1, selanjutnya periode 2017 menjabat sebagai Wakil Bendahara 1 dan Organisasi Ekstra yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menjabat sebagai Bendahara Umum pada periode 2016-2017. Selain itu penulis pernah mengikuti Praktek Peradilan Semu yang diadakan oleh Jurusan dan berperan sebagai Panitera.